PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Jumat Tanggal: 09 Juni 2017 Halaman: 10

DLH Tagih Retribusi Sampah

JOGJA, BERNAS -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta berupaya melakukan penagihan tunggakan pembayaran retribusi sampah dari masyarakat untuk pembayaran 2016. Hingga kini nilai tunggakan semakin berkurang menjadi sekitar Rp 46 juta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana, Kamis (8/6) menyatakan nilai tunggakan pembayaran retribusi sampah yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai sekitar Rp 363 juta.

"Setelah dilakukan upaya penagihan, nilai tunggakan berkurang menjadi sekitar Rp 46 juta. Penagihan akan terus kami lakukan," kata dia.

Dia mengakui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lemah soal administrasi pembayaran retribusi sampah, meskipun sudah memiliki data warga yang menjadi wajib retribusi sampah.

Selama ini, DLH Kota Yogyakarta bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menarik pembayaran retribusi sampah dari masyarakat di antaranya melalui dasa wisma, PKK, atau melalui ketua RT dan RW.

"Kami membagikan satu bendel kuitansi pembayaran retribusi sampah. Sering kuitansi tersebut tidak kembali lagi ke kami meskipun masih ada warga yang belum memenuhi kewajibannya membayar retribusi," katanya.

Data warga yang sudah membayar retribusi sampah, juga tidak terdokumentasi dengan baik sehingga DLH Kota Yogyakarta tidak dapat mengidentifikasi secara pasti nama atau alamat warga yang sudah melakukan pembayaran retribusi sampah.

Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 52.000 wajib retribusi sampah dengan besaran retribusi yang berbeda-beda, mulai Rp 2.000 per bulan untuk warga yang tinggal di perkampungan hingga Rp 1 juta untuk usaha perhotelan di jalan protokol.

"Pada tahun ini, mekanisme penarikan atau pembayaran retribusi sampah harus diperbaiki sehingga permasalahan seperti ini tidak terulang. Pencatatan harus diperbaiki sehingga kami tahu siapa dan untuk bulan apa mereka membayar retribusi," katanya.

Dalam satu tahun, total retribusi sampah yang dikumpulkan dari masyarakat ditargetkan mencapai Rp 3,2 miliar.

"Selain tunggakan 2016, masih ada tunggakan retribusi sampah untuk 1996 ke belakang. Nilainya sekitar Rp 11,5 juta. Kami berharap, tunggakan bisa dihapus karena sudah tidak ada data yang pasti mengenai siapa yang menunggak retribusi," katanya.

Tunggakan pembayaran retribusi sampah menjadi salah satu temuan BPK dalam laporan pemeriksaan terhadap pendapatan Kota Yogyakarta 2016. DPRD Kota Yogyakarta kemudian membentuk Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai tindak lanjutnya.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mendukung usulan penghapusan retribusi sampah yang tertunggak hingga sekitar 20 tahun.

"Data sudah tidak ada. Tinggal bagaimana political will dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara aturan pun, sudah memenuhi syarat. Tunggakan retribusi lebih dari tiga tahun sudah bisa dihapus," katanya.

(ant)

WWW.
http://cetak.harianbernas.com/32228

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005